

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Perda Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat

VISI dan MISI BPBD

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD, Maka dirumuskanlah visi BPBD Provinsi Sumatera Barat, yaitu “ *Mewujudkan Sumatera Barat Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal dalam menghadapi Bencana* ”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan dan ditetapkan misi BPBD Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan Pengurangan Risiko Bencana dan Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah;
2. Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah, rencana aksi daerah, peta risiko bencana, kebijakan, prosedur dan standar yang dibutuhkan pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
3. Mengurangi risiko bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana dan terpadu;
4. Menciptakan system kesiapsiagaan dan peringatan dini menghadapi bencana di Sumatera Barat;
5. Pengkajian dampak bencana secara cepat dan tepat serta penentuan status keadaan darurat bencana;

6. Menjalankan fungsi komando dan koordinasi serta melakukan kegiatan penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana dan perlindungan terhadap kelompok rentan;
7. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital dalam kerangka pemulihan awal (*early recovery*)
8. Analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat (DaLA, HRNA dan PDNA):
9. Melakukan perencanaan, pengawasan dan mengkoordinir kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan dampak bencana dalam segala aspek.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2016. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2016 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.

- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2016 meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN

TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset

- 5.2.2. Kewajiban
- 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Pendapatan LO
 - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN dan PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun 2016 yang disebabkan oleh adanya estimasi yang tidak sesuai dengan perkiraan semula, kemudian karena adanya perkembangan kebijakan dibidang kebencanaan yang ditetapkan melalui sasaran peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana .

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bidang penanggulangan bencana. Adapun tugas pokok dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Memertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi, yaitu :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

Dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan program kerja utama untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam;
7. Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana
8. Program Peningkatan Mitigasi Bencana
9. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD tahun anggaran 2016 meliputi hal berikut :

1. Kebijakan pengeluaran/belanja

Kebijakan pengeluaran/belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang telah ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah dengan menerapkan prinsip *value for money* (ekonomis, efisien dan efektif) serta akuntabel dan transparan, disamping itu juga melalui peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja agar pencairan dana selama tahun 2016 sesuai dengan anggaran kas

yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2016, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun indikator pencapaian target kinerja program dan kegiatan direncanakan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Terdiri dari 12 (Dua belas) kegiatan guna membantu kelancaran pelayanan administrasi di lingkungan BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan indikator sasaran meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran 100%
2.	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran secara baik 100%
3.	Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran secara baik 100%
4.	Alat Tulis Kantor	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran secara baik 100%
5.	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran secara baik 100%
6.	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran secara baik 100%
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran 100%
8.	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran secara baik 100%
9.	Penyediaan Makanan dan minuman	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran 100%

10.	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi Kedalam Daerah dan Luar Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran 100%
11.	Penyediaan Jasa pengamanan kantor	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran 100%
12.	Penyediaan Jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran 100%
13.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran 100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan terciptanya suasana yang kondusif 100%
2.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dan terciptanya suasana yang kondusif 100%
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dan terciptanya suasana yang kondusif 100%
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dan terciptanya suasana yang kondusif 100%
5.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dan terciptanya suasana yang kondusif 100%
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan jaringan	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dan terciptanya suasana yang kondusif 100%
7.	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dan terciptanya suasana yang kondusif 100%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 60 stel.

No	Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Meningkatnya disiplin dan etos kerja aparatur 100%

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya pengetahuan/wawasan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5 orang.

No	Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya penerapan peraturan dan perundang-undangan di lingkungan kerja 100%

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No	Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya tertib administrasi keuangan 100%
2.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Meningkatnya tertib administrasi keuangan 100%
3.	Penatausahaan keuangan SKPD	Meningkatnya tertib administrasi keuangan 100%

6. Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam

No	Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Monitoring & Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam 100%
2.	Monitoring & Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terlaksananya Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam

	Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Mentawai Tahun 2010	100%
3.	Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2010 (Tunggakan kegiatan TA.2011 dan TA.2013)	Terlaksananya Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam 100%

7. Program Peningkatan Mitigasi Bencana

No	Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Penyusunan perencanaan dan kebijakan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur) 100%
2	Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan	Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur) 100%
3	Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan	Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur) 100%
4.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur) 100%

8. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

No	Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana daerah	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana 100%
2	Peningkatan kapasitas kelembagaan kesiapsiagaan bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana 100%
3	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengurangan resiko bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana 100%
4.	Peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana 100%
5.	Peningkatan dan pengembangan pusdalops penanganan bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana 100%
6.	Peningkatan simulasi dan pelatihan kebencanaan	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana 100%

7.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana 100%
----	---	--

9. Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana

No	Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	Meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana 100%
2	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana	Meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana 100%
3	Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	Meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana 100%

10. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

No	Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat	Meningkatnya penanganan tanggap darurat pasca bencana 100%
2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan Tanggap Darurat Bencana	Meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana 100%

11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan

No	Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengurangan Resiko Bencana	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan 100%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana.	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan 100%
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap darurat	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan 100%
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan 100%

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam tahun Anggaran 2016, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan Belanja daerah untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sejumlah Rp. 36.852.771.910,- direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Pegawai Rp. 4.122.897.969,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 27.356.367.941,-
- Belanja Modal Rp. 5.373.506.000,-

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016 diperoleh realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 0,-

Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
BELANJA	36,852,771,910	31,765,147,699	86.19	5,087,624,211
BELANJA OPERASI	31,479,265,910	29,916,902,741	95.04	1,562,363,169
Belanja Pegawai	4,122,897,969	3,983,003,668	96.61	139,894,301
Belanja Barang	27,356,367,941	25,933,899,073	94.80	1,422,468,868
BELANJA MODAL	5,373,506,000	1,848,244,958	34.40	3,525,261,042
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	1,846,506,000	1,471,058,808	79.67	375,447,192
Belanja Gedung dan Bangunan	3,527,000,000	377,186,150.00	10.694	3,149,813,850
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

Seluruh realisasi belanja senilai Rp. 31.765.147.699,- atau 86.19 % dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 36.852.771.910,-.

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terealisasi sebesar Rp. 1.162.304.113,- dari anggaran sebesar Rp. 1.282.337.500,- atau 90.64 %**

NO	URAIAN	REALISASI	ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	7,930,320	8,000,000	69,680	99.13
2	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167,112,402	240,000,000	72,887,598	69.63
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	164,959,300	166,900,000	1,940,700	98.84
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	34,994,836	35,000,000	5,164	99.99
5	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	24,996,305	25,000,000	3,695	99.99
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,983,873	8,000,000	16,127	99.80
7	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	10,918,932	11,000,000	81,068	99.26
8	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Per UU	21,090,000	22,800,000	1,710,000	92.50
9	Penyediaan Makan dan minum	24,092,000	39,400,000	15,308,000	61.15
10	Rapat Koordinasi kedalam dan keluar daerah	246,926,145	265,230,000	18,303,855	93.10
11	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	29,010,000	29,010,000	-	100.00
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor	327,740,000	327,740,000	-	100.00
13	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	94,550,000	104,257,500	9,707,500	90.69
	JUMLAH	1,162,304,113	1,282,337,500	120,033,387	90.64

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terealisasi sebesar Rp. 497.100.173,- dari anggaran sebesar Rp. 517.013.500,- atau 96.15%

NO	URAIAN	REALISASI	ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
1	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan studio, komunikasi dan informasi	7,427,819	7,500,000	72,181	99.04
2	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor	173,848,000	175,000,000	1,152,000	99.34
3	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	213,647,966	225,833,500	12,185,534	94.60
7	pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	25,046,092	25,050,000	3,908	99.98
8	pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	15,189,363	15,200,000	10,637	99.93
9	pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan	29,829,637	30,000,000	170,363	99.43
10	pengelolaan dan pengawasan pengendalian aset SKPD	32,111,296	38,430,000	6,318,704	83.56
	JUMLAH	497,100,173	517,013,500	19,913,327	96.15

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya terealisasi 86.67 % sebesar Rp. 28.080.000,- dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 32.400.000,-

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan ini terealisasi sebesar Rp.10.006.350,- atau 32.58 % dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 30.709.000,-.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terealisasi 98.36% atau sebesar Rp. 210.740.000,- dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 214.240.000,-

No	Uraian	Realisasi	Anggaran	Sisa Anggaran	%
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,796,000	5,796,000	-	100
2	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	7,569,000	7,569,000	-	100
3	Penatausahaan Keuangan SKPD	197,375,000	200,875,000	3,500,000	98.26
	Jumlah	210,740,000	214,240,000	3,500,000	98.36

6. Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam terealisasi 98.57 % atau sebesar Rp. 19.398.791.395,- dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 19.680.873.941,- .

NO	URAIAN	REALISASI	ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
1	Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah provinsi sumatera barat	408,625,732	534,840,000	126,214,268	76.40
2	Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami mentawai tahun 2010	691,066,920	846,230,000	155,163,080	81.66
3	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2010 (Tunggakan kegiatan TA 2011 dan TA 2012) berdasarkan hasil verifikasi BPKP Provinsi Sumatera Barat No.LAT-185/PW03/2/2015 Tanggal Juli 2015)	18,299,098,743	18,299,803,941	705,198	100.00
	JUMLAH	19,398,791,395	19,680,873,941	282,082,546	98.57

7. Program Peningkatan Mitigasi Bencana terealisasi atau sebesar Rp. 806.200.728,- atau 88.18% dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 914.300.000,-

NO	URAIAN	REALISASI	ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
1	Penyusunan perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana	196,813,101	230,000,000	33,186,899	85.57
2	Penyusunan data dan informasi kebencanaan	163,016,014	180,000,000	16,983,986	90.56
3	Peningkatan informasi dan sosialisasi kebencanaan	264,617,901	300,000,000	35,382,099	88.21
4	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana	181,753,712	204,300,000	22,546,288	88.96
	JUMLAH	806,200,728	914,300,000	108,099,272	88.18

8. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana terealisasi 84.59% atau sebesar Rp. 2.576.642.136,- dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 3.046.000.000,-

URAIAN	REALISASI	ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana daerah	71,565,507	74,684,000	3,118,493	95.82
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan kesiapsiagaan bencana	191,233,537	250,000,000	58,766,463	76.49
Peningkatan kapasitas kelembagaan pengurangan resiko bencana	582,312,897	614,430,000	32,117,103	94.77
Peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana	223,726,226	250,000,000	26,273,774	89.49
Pengembangan dan peningkatan Operasional Pusdalops PB	806,721,050	1,030,000,000	223,278,950	78.32
Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan	279,182,409	330,000,000	50,817,591	84.60
peningkatan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	421,900,510	496,886,000	74,985,490	84.91
JUMLAH	2,576,642,136	3,046,000,000	469,357,864	84.59

9. Program Pemulihan Daerah Pasca terealisasi sebesar Rp.472.434.997,- atau sebesar 84.36% dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 560.000.000,-

No	Uraian	Realisasi	Anggaran	Sisa Anggaran	%
1	Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	167.203.376	190.000.000	220.796.624	88.00
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	154.886.788	190.000.000	34.393.212	81.52
3	Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	150.344.833	180.000.000	29.655.167	83.52
	Jumlah	472.434.997	560.000.000	86.125.003	84.36

10. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam terealisasi sebesar Rp. 403.342.667,- atau 84.03% dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.480.000.000,-

No	Uraian	Realisasi	Anggaran	Sisa Anggaran	%
1	Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat	257.051.599	300.000.000	42.948.401	85.68
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana	146.291.068	180.000.000	33.708.932	81.27
	Jumlah	403.342.667	480.000.000	76.657.333	84.03

11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan Terealisasi sebesar Rp. 2.219.691.472,- atau 37.17% dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 5.972.000.000,-

No	Uraian	Realisasi	Anggaran	Sisa Anggaran	%
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	1.923.720.396	5.373.500.000	3.449.779.604	35.80
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat	295.971.076	598.500.000	302.528.924	49.45
	Jumlah	2.219.691.472	5.972.000.000	3.752.308.528	37.17

1. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Adapun kegiatan- kegiatan yang tidak terealisasi dibawah 90 % merupakan efisiensi kegiatan .

Kegiatan	Realisasi	Keterangan
1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya, Air dan Listrik (01.02)	69.63%	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan
2. Penyediaan Makan Minum (01.17)	61.15%	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan
3. Pengelolaan dan pengawasan dan pengendalian asset SKPD (02.29)	83.56%	Honorarium Pengelola Situs Portal Sumbar tidak direalisasikan
4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya (03.01)	86.67%	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan
5. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan per undang-undangan (05.02)	32.58%	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan
6. Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah	76.40%	Dana Monev untuk kegiatan Rehab Rekon pada 5 Kab/Kota (Sawahlunto, Padang, Solok, Solok

provinsi sumatera barat (29.05).		Selatan, Tanah Datar) mengalami perpanjangan waktu sampai Tahun 2017, maka secara otomatis dana kegiatan harus diperpanjang dengan menggunakan sisa dana yang ada.
7. Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi pasca bencana gempa bumi dan tsunami mentawai tahun 2010 (29.06).	81.66%	Kegiatannya untuk 2 Tahun Anggaran, Sisa Anggaran untuk Tahun 2017.
8. Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana (35.01)	85.57%	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan
9. Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan (35.03)	88.21%	SPPD Luar Daerah sesuai Kebutuhan
10. Koordinasi Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana (35.04)	88.96%	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan
11. Peningkatan kapasitas kelembagaan kesiapsiagaan bencana (36.02)	76.49%	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan
12. Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan bencana (36.04)	89.49%	1. Tingkat Kehadiran Peserta Kegiatan yang Dikirim Oleh Masing – masing Instansi Tidak Sesuai dengan Jumlah yang Diminta 2. Kebutuhan Terhadap Dana Untuk Pelaksanaan Kegiatan Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan , Adanya Sisa Anggaran Terutama dalam Perjalanan Dinas lebih merupakan kepada Efisiensi Kegiatan.
13. Pengembangan dan Peningkatan Operasional Pusdalops PB (36.05)	78.32%	Pembayaran Honorarium Satgas Sesuai Standar Biaya.
14. Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan (36.06)	84.60%	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan

15. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana (36.07)	84.91%	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan
16. Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana (43.01)	84.49%	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan
17. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana (43.02)	81.90%	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan
18. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (43.03)	83.52%	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan
19. Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat (44.01)	85.68%	Efisiensi keuangan yang tidak bisa direalisasikan karena yang dibayarkan sesuai kebutuhan
20. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana (44.02)	81.27%	Terjadinya Penurunan Harga BBM sehingga tersisa biaya BBM
21. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana (45.02)	35.80%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Waktu Dalam Penentuan Titik – Titik Pemasangan Alat yang Direncanakan. 2. Adanya Memorandum dari Gubernur Sumatera Barat untuk Menghentikan Semua Pengadaan yang Belum Tayang ataupun yang diajukan ke Unit layanan Pengadaan (ULP), Sehingga Terhitung tanggal 1 September 2016 ULP tidak Lagi Memproses Semua Pengadaan dan Akibatnya Terdapat 2 (Dua) Paket Pekerjaan yang Tidak Terlaksana yaitu Pengadaan Alat Sirine Peringatan Dini Tsunami dan Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana (EWS) di BPBD Agam. 3. Kurang Cukupnya Waktu dan Referensi

			Dalam Mempersiapkan Dokumen Terkait Pengadaan.
			4. Keterbatasan SDM yang Ada Untuk Mengelola Pelaksanaan Kegiatan.
22. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat (45.03)	49.45%	1	(Satu) Paket Pekerjaan Tidak Dapat Direalisasikan Karena Penyediaan Dari Luar Negeri

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2016, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat *basis akrual* untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di kas

umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Asset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan / atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos – pos asset, kewajiban dan ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Pengukuran / Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal / nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

c. Investasi Jangka Pendek.

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

d. Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian / pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar / harga taksiran pada saat perolehan.

f. Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar / taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan asset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

g. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

h. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, jalan, Irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya – biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

i. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu asset. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari asset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos – pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian asset tetap. Pada tahun anggaran 2005 dilaksanakan penyusunan neraca awal pemerintah propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh asset-aset tetap dan untuk pengadaan jenis asset yang masa perolehan / pengadaan setelah tahun anggaran penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost). Mulai tahun 2014 telah dilakukan Penyusutan Aset Tetap mulai disusutkan pertama sekali adalah Saldo Per 31 Desember 2013.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
a.	Belanja Pegawai	4.122.897.969	3.983.003.668	96.61	4.509.431.428

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 96.61% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 terdapat penurunan sebesar Rp. 526.427.760,-. Disebabkan karena pada tahun anggaran 2016 tidak dibayarkan Belanja Pegawai berupa tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif (THR). Belanja pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS.

Jumlah realisasi belanja tersebut terdiri dari:

A.	Belanja Pegawai Tidak Langsung	4,122,897,969	3,983,003,668	96.61	4,059,431,428
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	3,057,834,449	3,039,220,346	99.39	2,978,350,881
	- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,446,473,040	2,437,167,000	99.62	2,313,360,400
	- Tunjangan Keluarga	227,357,432	224,039,344	98.54	240,748,280
	- Tunjangan Jabatan	140,440,000	138,450,000	98.58	135,200,000
	- Tunjangan Fungsional Umum	94,160,180	92,105,000	97.82	97,325,000
	- Tunjangan Beras	138,815,260	136,873,800	98.60	153,109,140
	- Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	10,549,735	10,549,735	100.00	38,562,751
	- Pembulatan Gaji	38,802	35,467	91.41	45,310
2	Tambahan Penghasilan PNS	1,065,063,520	943,783,322	88.61	1,081,080,547
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	976,263,520	943,783,322	96.67	976,580,547
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	88,800,000	-	-	104,500,000

Saldo / jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto. Selama tahun 2016 tidak adanya setor atau pengembalian belanja pegawai tidak langsung.

b.	Belanja Barang & Jasa	27.356.367.941	25.933.899.073	94.80	7.060.346.615
-----------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	----------------------

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 94.80% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 terdapat Kenaikan sebesar Rp. 18.906.552.458,-

Belanja Barang dan Jasa Terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
Belanja Bahan Pakai habis	706,655,224	506,934,033	71.74	837,147,875
Belanja Jasa Kantor	1,357,925,500	1,058,709,722	77.97	899,026,628
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	227,345,500	215,159,966	94.64	166,933,261
Belanja Cetak &Penggandaan	255,458,450	204,744,578	80.15	321,048,431
Belanja Sewa/ Gedung/Gudang/Parkir	43,830,000	41,330,000	94.30	11,750,000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	104,510,000	77,260,000	73.93	-
Belanja Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor	3,000,000	3,000,000	100	-
Belanja Makan Minum	479,722,000	414,656,000	86.44	458,500,000
Belanja Pakaian Dinas	32,400,000	28,080,000	86.67	29,700,000
Belanja Pakaian Kerja	300,624,000	288,006,427	95.80	287,393,745
Belanja Perjalanan Dinas	3,178,027,750	2,883,614,560	90.74	1,563,147,572
Belanja Pemeliharaan	416,750,000	299,190,911	71.79	371,847,303
Belanja Jasa Konsultansi	167,200,000	167,097,000	99.94	417,199,000
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada masyarakat/Pihak ketiga	17,809,988,517	17,805,650,576	99.98	69,598,000
Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS	97,875,000	84,500,000	86.33	10,425,000
Uang Untuk Diberikan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat	21,200,000	21,200,000	100.00	-
Honorarium PNS	912,700,000	770,515,000	84.42	547,760,000
Honorarium Non PNS	1,074,256,000	899,291,000	83.71	297,750,000
Belanja Jasa Lainnya	166,900,000	164,959,300	98.84	234,429,800
Jumlah Belanja Barang & Jasa	27,356,367,941	25,933,899,073	94.80	6,523,656,615

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.422.468.868,-

Berikut rincian belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga:

No	Nama Barang	Volume	Harga Satuan	Total Harga	Penerima
1	Pembangunan Jembatan di Kec. Pagai Selatan	1 paket	5.362.260.200	5.362.260.200	Kec. Pagai Selatan
2	Pembangunan Jembatan di Kec. Sikakap	1 Paket	3.212.852.042	3.212.852.042	di Kec. Sikakap
3	Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Jembatan di kec. Sikakap	1 Paket	131.174.024	131.174.024	di kec. Sikakap
4	Pengawasan Pekerjaan pembangunan Jembatan di Kec. Pagai Selatan	1 paket	116.680.058	13.750.000	di Kec. Pagai Selatan
5	Pembuatan DED Jalan Lingkungan dan Kolektor Kec.Sipora Selatan	1 Paket	121.950.000	18.250.000	Kec.Sipora Selatan
6	Pembuatan DED Jalan Lingkungan dan Kolektor kec. Pagai Selatan	1 Paket	134.341.000	134.341.000	kec. Pagai Selatan
7	Pembuatan DED Jalan Lingkungan dan Kolektor kec. Pagai Utara dan Sikakap	1 Paket	119.870.000	119.870.000	kec. Pagai Utara dan Sikakap
8	Perencanaan Teknis	1 Paket	57.503.750	57.503.750	Sikakap-

	Jalan Trans Mentawai (Ruas Jalan Sikakap- Makapinang)				Makapinang
9	Perencanaan Teknis Jalan Trans Mentawai (Ruas Jalan Sikakap- Mapinang)	1 Paket	116.022.800	116.022.800	Sikakap- Makapinang
10	Perencanaan Teknis Jalan Trans Mentawai (Ruas Jalan Polaga- Surat Aban)	1 Paket	104.102.850	104.102.850	Polaga- Surat Aban
11	Perencanaan Teknis Jalan Trans Mentawai (Ruas Jalan Muaro Taikako-Sp, Silabu- Maguiro)	1 Paket	70.450.200	70.450.200	Muaro Taikako-Sp, Silabu- Maguiro
12	Pematangan Lahan/Land Clearing tapak Huntap Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial (Swakelola TNI)	1 Paket	8.205.781.592	8.205.781.592	Kab. Mentawai
13	Perlengkapan Dapur Umum	1 Set	28.252.200	28.255.260	Kab. Padang Pariaman
14	Peralatan Komunikasi	1 Set	24.376.000	24.406.800	Kab. Padang Pariaman
	Jumlah		17.805.650.576	17.805.650.576	

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja barang dan jasa selama tahun 2016 sejumlah Rp. 1.220.000,- yang terdiri dari :

- a. Belanja Bahan Habis Pakai Sebesar Rp.500.000,- Terdiri atas Setoran Keterlanjuran Pembayaran Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 720.000,- terdiri atas setoran keterlanjuran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana.

2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
1.	Belanja Modal	5.373.506.000	1.848.244.958	34.40	731.237.722

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2016 dan 2015 . Realisasi tahun 2016 mencapai 34.40 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar Rp. 1.117.007.236,- Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Aset tetap Lainnya, antara lain:

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
a.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Tanah tahun 2016 dan 2015. Tahun 2016.

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
		2016			

b.	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	1.846.506.000	1.471.058.808	79.67	632.415.922
-----------	--	----------------------	----------------------	--------------	--------------------

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2016 dan 2015. Realisasi tahun 2016 mencapai 79.67% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar Rp. 838.642.886,-

Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%	Tahun 2015
Kamera Nikon 1 Unit	50,000,000	18,929,455	37.86	31,070,545
Perlengkapan Vertikal Rescue 1 paket	196,000,000	193,747,675	98.85	2,252,325
Alat Ukur Ketinggian Air 1 Paket	150,000,000	144,518,000	96.35	5,482,000
Pompa Air Portable 18 Unit	998,640,000	821,700,000	82.28	176,940,000
Alat Komunikasi Radio VHF (Repeater Link, Radio RIG,HT) 1 Paket	182,466,000	179,663,000	98.46	2,803,000
Chainsaw Besar dan kecil 10 Unit	100,000,000	96,582,750	96.58	3,417,250
Peralatan Charger (Accu Charging) 2 unit	9,000,000	7,931,550	88.13	1,068,450
Alat Bantu Pengukuran Elektronik (Multi Tester Digital) 2 unit	6,000,000	3,617,900	60.30	2,382,100
White Board Kaca 2 unit	2,250,000	2,242,228	99.65	7,772
Alat Dapur 1 Set	2,150,000	2,126,250	98.90	23,750
Alat Studio	150,000,000	-	-	150,000,000
JUMLAH	1,846,506,000	1,471,058,808	79.67	411,383,300

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 375.447.192,-

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ini, sejumlah Rp. 2.126.250,- dikoreksi dari aset tetap peralatan Mesin yaitu Pengadaan Alat Dapur karena termasuk kedalam belanja modal yang tidak dikapitalisir, yang terdiri dari:

Nama Barang	Jumlah	Harga
Pengadaan Alat Dapur	1 set	2.126.250

Tidak dikapitalisirnya belanja modal tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 .

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
c.	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	3.527.000.000,-	377.186.150,-	10.69	98.821.800,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2016 dan 2015. Realisasi tahun 2016 mencapai 10.69% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar Rp. 278.364.350,-

Adapun rincian objek belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

Nama Barang	Jumlah	Harga
Baliho Peringatan Tsunami	5	183.278.150,-
Rambu – rambu Evakuasi (Rambu-rambu Gunung Talang SNI)	130	193.908.000

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 3.149.813.850,-

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ini, sejumlah Rp. 377.186.150,- dimutasi ke peralatan dan Mesin.

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
d.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	17.823.700,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya tahun 2016 dan 2015. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat penurunan sebesar Rp.17.823.700,-

Adapun rincian objek belanja modal Aset Tetap Lainnya terdiri dari: (Uraikan dalam bentuk tabel)

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
e.	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	70.727.818,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal asset lainnya tahun 2016 dan 2015. Realisasi tahun 2016 mencapai 0% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat penurunan sebesar Rp. 70.727.818,-

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Aset Lancar

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
1. Kas Dibendahara Pengeluaran	-	-

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015. Sampai dengan 31 Desember 2016, sisa UYHD sebesar Rp.4.418.697,-, telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2016. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2016.

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
2. Persediaan	87.564.050,-	207.652.400,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu :

Persediaan Bahan Pakai Habis		
- Persediaan Alat Tulis Kantor	651.750,-	533.400,-
- Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	175.000,-	-
- Persediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	210.000	-
- Persediaan Bahan Pakai Habis Lainnya	85.642.500	206.000.000,-
Persediaan Bahan/Material		
- Persediaan Bahan Dokumentasi/Cetakan	884.800,-	1.119.000,-
Jumlah	87.564.050,-	207.652.400,-

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan Bahan Pakai Habis	206.533.400,-	503.350,-	119.854.150,-	86.679.250,-
- Persediaan Alat Tulis Kantor	533.400,-	118.350,-	-	651.750,-
- Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	-	175.000,-	-	175.000,-
- Persediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	-	210.000,-	-	210.000,-
- Persediaan Bahan Pakai Habis Lainnya	206.000.000,-	-	119.854.150,-	85.642.500,-
Persediaan Bahan Material	1.119.000,-	-	234.200,-	884.800,-
- Persediaan Bahan Dokumentasi/Cetakan	1.119.000,-	-	234.200,-	884.800,-

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
1. Peralatan dan Mesin	17.821.665.014,-	15.969.254.306,-

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2016 dan 2015 .

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 4.304.258.905,-
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2016 Rp. 13.517.406.109,-

Daftar Peralatan dan Mesin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin	15.969.254.306,-	1.854.536.958,-	2.126.250,-	17.821.665.014
Akm. Penyusutan Peralatan Mesin	11.722.342.654.77,-	1.899.261.206,86,-	-	13.621.603.861,63,-
Nilai Buku	4.246.911.651,23,-	(44.724.248,86,-)	2.126.250,-	4.200.061.152,37,-

Saldo Audited 2015

15.969.254.306,-

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2016

1.471.058.808,-

Muatasi Antar SKPD

6.292.000.00,-

Reklas

377.186.150,-

Total Mutasi Tambah

1.854.536.958,-

Mutasi Kurang

Belanja Modal Yang Tidak Dikapitalisir	2.126.250,-
Total Mutasi Kurang	2.126.250,-
Total Mutasi	1.852.410.708,-
Saldo per 31 Des 2016	17.821.665.014,-

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.471.058.808 dan sebesar Rp. 377.186.150 yang merupakan Reklasifikasi dari Gedung dan bangunan,- telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Reklasifikasi senilai Rp.2.126.250,- yaitu ke Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisir terdiri dari : Pengadaan Alat Dapur sebanyak 1 Set.
- b) Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
2. Gedung dan Bangunan	87.236.000,-	87.236.000,-

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2016 dan 2015 .

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. -
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2016 Rp. 87.236.000,-

Daftar Gedung dan Bangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung Bangunan	87.236.000,-	377.186.150,-	377.186.150,-	87.236.000,-
Akm. Penyusutan Gedung Bangunan	6.778.880,-	1.744.720,-	-	8.523.600,-
Nilai Buku	80.457.120,-	(1.744.720)	-	78.712.400,-

Saldo Audited 2015	87.236.000,-
<u>Mutasi Tambah</u>	
Belanja Modal tahun 2016	377.186.150,-
Total Mutasi Tambah	377.186.150,-
<u>Mutasi Kurang</u>	
Reklas ke Peralatan Mesin	377.186.150,-
Total Mutasi Kurang	377.186.150,-
Total Mutasi	-
Saldo per 31 Des 2016	87.236.000,-

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 377.186.150,- telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Reklas ke Peralatan Mesin senilai Rp. 377.186.150,- telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
-----------	------	----------------

3. Aset Tetap Lainnya	17.823.700,-	17.823.700,-
------------------------------	---------------------	---------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2016 dan 2014 .

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. -
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2016 Rp. 17.823.700,-

Daftar Aset Tetap Lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akdir
Aset Tetap Lainnya	17.823.700,-	-	-	17.823.700,-
Akm. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Nilai Buku	17.823.700,-	-	-	17.823.700,-

Saldo Audited 2015	17.823.700,-
<u>Mutasi Tambah</u>	
Total Mutasi Tambah	-
<u>Mutasi Kurang</u>	
Total Mutasi	-
Saldo per 31 Des 2016	17.823.700,-

Tidak terdapat penambahan maupun pengurangan asset tetap lainnya selama tahun anggaran 2016, selanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 17 .

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.294.957.000,-	-

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2016 dan 2015 .

3) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2010 Rp. -
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2016 Rp. 2.294.957.000,-

Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB F, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

4) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	2.294.957.000,-	-	2.294.957.000,-
Akm. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Nilai Buku	-	-	-	-

Saldo Audited 2015

-

Mutasi Tambah

Hibah Dari Pihak Ketiga

2.294.957.000,-

Total Mutasi Tambah

2.294.957.000

Mutasi Kurang

Total Mutasi

-

Saldo per 31 Des 2016

2.294.957.000,-

Penjelasan Mutasi Tambah

Adanya hibah pihak ketiga dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri berupa Bangunan (konstruksi dalam pengerjaan) tanggal 10 Mei 2016.

Selanjutnya daftar rekap dapat dilihat pada lampiran 20.

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
1. Akumulasi Penyusutan	13.630.127.461,63	11.729.121.534,77

Terdiri dari :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	13.621.603.861,63	11.722.342.654,77
- Akumulasi Penyusutan Gdg & Bangunan	8.523.600	6.778.880
- Akumulasi Penyusutan Jln, Irigasi & Jaringan	-	-
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2016 dan 2015. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	11.722.342.654,77	1.899.261.206,66	-	13.621.603.861,63
Akm. Penyusutan Gedung Bangunan	6.778.880	1.744.720	-	8.523.600

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jln Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2015 (NERACA RESTATEMENT)	11.722.342.654,77	6.778.880	-	-
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	-	-	-	-
○ Kurang Catat/tdk tercatat	-	-	-	-
○ Hibah dr Pihak Ketiga	-	-	-	-
○ Mutasi antar SKPD	1.368.400	-	-	-
○ Reklasifikasi	-	-	-	-
○ Koreksi + Saldo Awal	-	-	-	-
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	-	-	-	-
○ Double Record	-	-	-	-
○ Hibah	-	-	-	-
○ Penghapusan	-	-	-	-
○ Mutasi antar SKPD	-	-	-	-
○ Reklasifikasi	-	-	-	-
○ Koreksi - Saldo Awal	-	-	-	-
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2016	1.897.892.806,66	1.744.720	-	-
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 16	13.621.603.861,63	8.523.600	-	-

Penjelasan tentang mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan ini dapat dilihat pada Lampiran 30.

ASET LAINNYA

Perkiraan	2016	2015 (Restatement)
1. Aset Tidak Berwujud	70.727.818,-	70.727.818,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2016 dan 2015.

Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp.70.727.818,- dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016.

Saldo Audited 2015	70.727.818
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi dari peralatan & Mesin	-
Total Mutasi Tambah	-
Total Mutasi	-
Saldo per 31 Des 2016	70.727.818

Penjelasan tentang mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan ini dapat dilihat pada Lampiran 19.

**2. Akumulasi Amortisasi Aset 48.538.727,20,- 41.142.364,-
Tidak Berwujud**

Uraian	Aset Tidak Berwujud
SALDO AKM AMORTISASI PER 31 DES 2015	41.142.364,-
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	-
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	-
o Double Record	0.40
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2016	7.396.363.60
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 16	48.538.727.20

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya posisi 31 Desember 2016 dan 2015, Terdiri dari:

1. Mutasi Tambah Akm. Amortisasi Aset tidak berwujud Sebesar Rp. 7.396.363,60,-
2. Koreksi Kurang Nilai Sesuai Apraisal Sebesar Rp. 0.40,-

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
1. Utang Belanja	185.738.634,-	168.225.885,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2016 dan 2015 . Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

- Utang belanja pegawai Rp. 173.000.706,-

Yaitu utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November sebesar Rp. 86.492.193,- dan bulan Desember sebesar Rp.86.508.513,- . Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No.12 tanggal 24 Februari 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pasal 44 yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada 2 bulan sebelumnya.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Pegawai	154.087.554,-	173.000.706,-	154.087.554,-	173.000.706,-

Penambahan sebesar Rp. 173.000.706,- adalah utang belanja tambahan penghasilan ke pada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November sebesar Rp.86.492.193,- dan bulan Desember sebesar Rp. 156.975.638,-

Pengurangan sebesar Rp. 154.087.554,- adalah pembayaran utang belanja pegawai berupa tunda November dan Desember 2015 dan telah dibayarkan pada bulan Januari dan Februari 2016

- Utang belanja barang dan Jasa Rp. 12.737.928,-

Yaitu utang belanja telpon sebesar Rp. 1.675.270,- listrik sebesar Rp. 8.736.158,- dan internet sebesar Rp. 2.326.500,- yang merupakan pemakaian bulan Desember 2016 yang dibayarkan bulan Januari 2017.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang dan Jasa	14.138.331	12.737.928,-	14.138.331,-	12.737.928,-

Penambahan sebesar Rp.12.737.928,- adalah utang listrik dan telepon bulan Desember 2016.

Pengurangan sebesar Rp. 14.138.331,- adalah pembayaran utang telepon dan listrik bulan Desember 2015 yang dibayar pada bulan Februari 2016.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

EKUITAS

Perkiraan	2016	2015)
1. Ekuitas	6.515.568.759,17,-	4.414.204.440,23,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015. Ekuitas ini terdiri dari:

Ekuitas	4.414.204.440,23
Surplus/Defisit LO	(31.964.082.483,46)
Perubahan SAL	31.765.147.669
Surplus/ Defisit LRA	(31.765.147.699)
RK PPKD	31.765.147.699

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2016	2015
a. Beban Pegawai	4.001.916.820,-	4.213.518.982,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2016. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO, Uang Lembur-LO dan Beban Pegawai BLUD , yaitu :

1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	3,039,220,346
	- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi LO	2,437,167,000
	_ Tunjangan Keluarga	224,039,344
	_ Tunjangan Jabatan	138,450,000
	_ Tunjangan Fungsional Umum	92,105,000
	_ Tunjangan Beras	136,873,800
	_ Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	10,549,735
	_ Pembulatan Gaji	35,467
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	-
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	962,696,474
	Jumlah	4.001.916.820

Saldo / jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih +/-
Gaji dan tunjangan	3.039.220.346,-	3.039.220.346,-	-
Gaji Pokok PNS	2,437,167,000	2,437,167,000	
Tunjangan Keluarga	224,039,344	224,039,344	
Tunjangan Jabatan	138,450,000	138,450,000	
Tunjangan Fungsional Umum	92,105,000	92,105,000	
Tunjangan Beras	136,873,800	136,873,800	
Tunjangan PPh/ Khusus	10,549,735	10,549,735	
Pembulatan	35,467	35,467	
Tambahan Penghasilan PNS	943.783.322,-	962.696.474,-	18.913.152,-
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	943.783.322,-	962.696.474,-	
Jumlah	3.983.003.668,-	4.001.916.820,-	154.087.554,-

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan penghasilan beban kerja PNS-LO bulan november 2016 Rp. 86.492.193,- dan bulan Desember 2016 sebesar Rp.86.508.513,- . Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Harian PNS yang telah bekerja bulan November dan Desember 2016 dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Januari dan Februari 2017 sehingga dicatat sebagai utang belanja pegawai per 31 Desember 2016.
- Penyesuaian untuk mengakui Utang Belanja Pegawai berupa Tambahan Penghasilan November dan Desember 2015 sebesar Rp. 154.087.554,- dan telah dibayarkan pada bulan Januari dan Februari 2016

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Semeseter 1		Penyesuaian Semester 2		Jumlah	
	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
Belanja Pegawai	154.087.554,-	-	-	173.000.706,-		(18.913.152)
	Perkiraan		2016		2015	

b. Beban Barang & Jasa	20.055.131.773,-	6.890.407.631,-
-----------------------------------	-------------------------	------------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2016. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

URAIAN	2016
Beban Pakai Habis	626,788,183
Beban Jasa Kantor	1,059,854,072
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	215,159,966
Beban Cetak dan Penggandaan	204,978,778
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	41,330,000
Beban Sewa Sarana Mobilitas	77,260,000
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,000,000
Beban Makan dan Minuman	414,656,000
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	28,080,000
Beban Pakaian Kerja	288,006,427
Beban Perjalanan dinas	2,883,614,560
Beban Pemeliharaan	299,190,911
Beban Jasa Konsultansi	167,097,000
Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	17,805,650,576
Beban Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	84,500,000
Honorarium PNS	770,515,000
Honorarium Non PNS	899,291,000
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	21,200,000
Beban Jasa Lainnya	164,959,300
JUMLAH	26,055,131,773

Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian beban barang dan jasa selama tahun 2016 sejumlah Rp. 1.220.000,- yang terdiri dari :

- a. Belanja Bahan Habis Pakai Sebesar Rp.500.000,- Terdiri atas Setoran Keterlanjuran Pembayaran Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 720.000,- terdiri atas setoran keterlanjuran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

OBJEK BELANJA LRA/LO	BELANJA BRG & JASA LRA	BEBAN BRG & JASA LO	SELISIH +/-
Beban Pakai Habis	506,934,033	626,788,183	(119,854,150)
Beban Jasa Kantor	1,058,709,722	1,059,854,072	(1,144,350)
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	215,159,966	215,159,966	-
Beban Cetak dan Penggandaan	204,744,578	204,978,778	(234,200)
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	41,330,000	41,330,000	-
Beban Sewa Sarana Mobilitas	77,260,000	77,260,000	-
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,000,000	3,000,000	-
Beban Makan dan Minuman	414,656,000	414,656,000	-
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	28,080,000	28,080,000	-
Beban Pakaian Kerja	288,006,427	288,006,427	-
Beban Perjalanan dinas	2,883,614,560	2,883,614,560	-
Beban Pemeliharaan	299,190,911	299,190,911	-
Beban Jasa Konsultansi	167,097,000	167,097,000	-
Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	17,805,650,576	17,805,650,576	-
bimbingan teknis PNS	84,500,000	84,500,000	-
Honorarium PNS	770,515,000	770,515,000	-
Honorarium Non PNS	899,291,000	899,291,000	-
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak	21,200,000	21,200,000	-
Beban Jasa Lainnya	164,959,300	164,959,300	-
JUMLAH	25,933,899,073	26,055,131,773	(121,232,700)

Penjelasan selisih:

Penyesuaian menambah beban barang dan Jasa

- Penyesuaian mengakui pemakaian beban bahan pakai habis pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Semester I		Penyesuaian Semester II		Jumlah	
	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
Alat Tulis kantor	87.300	-	31.050	-	118.350	
Alat listrik dan Elektronik	-	-	175.000	-	175.000	
Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	-	-	210.000	-	210.000	
Bahan Pakai Habis Lainnya	-	-	(120.357.500)	-	(120.357.500)	
Jumlah	87.300	-	(119.941.450)	-	(119.854.150)	

- Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2016 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air, internet bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2016.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Semester I		Penyesuaian Semester II		Jumlah	
	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
Beban Telpon	-	1.968.817	1.675.270			293.547
Beban listrik	-	7.346.261	8.736.158		1.389.897	
Beban Internet	-	2.278.500	2.236.500	-	-	42.000

- Penyesuaian mengakui pemakaian beban Cetak dan Penggandaan pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu:

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Semester I		Penyesuaian Semester II		Jumlah	
	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
Belanja Bahan Dokumentasi/Cetakan	36.517.000	-	-	36.751.200		234.200

Perkiraan	2016	2015
c. Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.907.033.890,46,-	1.719.180.497.36

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2016. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

• Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.897.892.806.86,-
• Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.744.720,-
• Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	-
• Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-
• Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.396.363.60,-

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82

Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17.

Sedangkan Daftar Jurnal Penyesuaian yang dibuat oleh SKPD untuk Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 28.

5.5. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2016	2015
Ekuitas Awal	4.414.204.440.23	5.512.448.043.62
Surplus Defisit –LO	(31.964.082.483.46)	(12.823.107.110.39)
RK PPKD	31.765.147.699	11.851.015.765
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar:	(2.295.375.503.4)	
1. Koreksi atas Hutang Jangka Pendek Rp. (2.544.753)		
2. Koreksi Atas Aset Mutasi Antar SKPD Rp. (4.923.600)		
3. Koreksi Atas Hibah KDP Rp. (2.294.957.000)		3
4. Koreksi Atas Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisir Rp.2.126.250		
5. Koreksi Lebih Catat Akm. Amortisasi Rp. (0.40)		
Ekuitas Akhir	6.515.568.759.17	4.414.204.440.23

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp.4.414.204.440.23,- adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca Restatement per 31 Des 2015, dengan rician sebagai berikut:

Ekuitas Audited 2015	16.143.325.975,-
Akumulasi Penyusutan 2014	(11.729.121.534.77,-)
Ekuitas Restatement 2014	4.414.204.440.23,-

2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. 31.964.082.483.46,- adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2016.
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.
Koreksi atas Hutang Jangka Pendek (2.544.753)
Koreksi atas Aset Mutasi Antar SKPD (4.923.600)
Koreksi atas Hibah KDP (2.294.957.000)
Koreksi Atas Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisir 2.126.250
Koreksi Lebih Catat Akm. Amortisasi (0.40)
4. RK PPKD sebesar Rp. 31.765.147.699,- adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2016 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
5. Ekuitas Akhir sebesar Rp.6.515.568.759.17,- adalah saldo Ekuitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016.

a. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka

3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah	-	-	-
• Pendapatan Pajak	-	-	-
• Pendapatan Retribusi	-	-	-
• Lain-lain PAD Yg Sah	-	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-	-
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	3.983.003.668,-	4.001.916.820,-	18.913.152,-
• Belanja Brg & Jasa	25.933.899.073,-	26.055.131.773,-	121.232.700,-
• Belanja Modal	1.848.244.958,-	-	1.848.244.958,-
• Beban Penyusutan & Amortisasi	-	1.907.033.890.46,-	1.907.033.890.46,-
• Beban Penyisihan Piutang	-	-	-
Jumlah Beban Operasi	31.765.147.699,-	31.964.082.483.46,-	3.895.424.700.46,-

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

Saldo Rekening Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan \Bencana Daerah per 31 Desember 2016 berjumlah Rp. 250.000.000,- yang merupakan saldo dana Bantuan Gubernur Sumatera Barat untuk daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Pekerjaan Infrastruktur Darurat Tanggul Sungai Batang Panambam Nagari Indra Pura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016, dimana dana tersebut baru masuk ke Rekening Bendahara Pengeluaran pada tanggal 7 Desember 2016, sedangkan kegiatan tersebut berlangsung selama 3(tiga) bulan terhitung mulai tanggal 7 Desember 2016.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

Kedudukan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana.

1. SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat (Humas) dan protokol. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi Umum
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. Pengelolaan administrasi keuangan
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan.
- e. Pengeloalaan urusan rumah tangga, humas dan protokol.
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang – undangan.
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas - tugas Bidang
- h. Pengeloalaan kearsipan dan perpustakaan Dinas.
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana.
- j. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

2. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan perencanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.
- c. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

3. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Bidang Kedaruratan dan Logistik, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kadaruratan dan logistik, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- b. Pengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan fungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulanagan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan kerja sama dibidang penanggulanagan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic;

- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Badan.

4. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- c. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanggulanagan bencana pada pasca bencana.
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

KOMPOSISI PEGAWAI

Jenis Kelamin		Pendidikan				Golongan			Jumlah
Laki-laki	Perempuan	S2	S1	D III	SLTA	II	III	IV	
37	14	11	21	5	14	11	32	8	51

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat berjumlah 51 (Lima Puluh Satu) Orang. Terdiri atas 42 (Empat Puluh Dua) orang Laki – laki dan 14 (Empat Belas) Orang perempuan.

BAB VII

PENUTUP

Berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggungjawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah tersebut, maka pada akhir tahun anggaran disusun suatu laporan keuangan yang terdiri dari; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran, sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	4.122.897.969	3.983.003.668	96.61
Belanja Barang dan Jasa	26.965.767.941	25.933.899.073	96.17
Belanja Modal	5.764.106.000	1.848.244.958	32.06
Jumlah	36.852.771.910	31.765.147.699	86.19

Total realisasi belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 31.765.147.699,-. Jumlah tersebut mencapai 86.19% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.36.852.771.910,-.

Dari rincian di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan kegiatan tidak terdapat adanya permasalahan yang berarti, dimana kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target indikator kerja yang telah direncanakan.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Ir. NASRIDAL PATRIA, MM.M.Hum
Pembina Tk. I
NIP.19601218 199202 1 001